

## ABSTRAK

### **RIVA GITA JULIANA : *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIUBUNGKAN DENGAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DI WILAYAH POLDA JAWA BARAT***

Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Dihubungkan dengan Pasal 36 UNDANG-UNDANG No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah POLDA Jawa Barat". Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah hukum POLDA Jawa Barat yang tidak sejalan dengan jumlah penyelesaian yang dilakukan pihak POLDA Jawa Barat. Yang dimana hal itu terjadi karena fenomena yang terjadi akhir akhir ini di masyarakat mengenai banyaknya tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia. Fenomena ini mencerminkan kekhawatiran atas meningkatnya tindak pidana tersebut dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dan mengevaluasi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut di wilayah POLDA Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggabungkan analisis terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka untuk memperoleh landasan teoritis dan hukum, serta wawancara dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret tentang penerapan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di wilayah POLDA Jawa Barat masih menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme jaminan fidusia, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti sosialisasi hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan regulasi dan pelaksanaan yang lebih tegas serta konsisten untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan Objek Jaminan Fidusia, POLDA Jawa Barat**